

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Rekrutmen partai Golkar yang dilakukan adalah dengan menggunakan konvensi yang melibatkan pengurus Desa serta Kecamatan untuk menentukan calon anggota legislatifnya berdasarkan daerah pemilihan.
2. Sedangkan dalam hal ini pengurus DPD II partai Golkar yang tidak masuk dalam pencalonan anggota legislatif serta senior dalam jajaran kepengurusan menjadi tim penjangkaran guna menentukan nomor urut.
3. Pelaksanaan konvensi partai Golkar dilakukan selama satu tahun dengan petunjuk tim penjangkaran.
4. Prioritas dalam pencalonan anggota legislatif lebih ditekankan kepada keterlibatannya selama lima tahun dalam kepengurusan serta tidak pernah terputus dan dedikasi, pengabdian serta loyalitas kader ditambah dengan kepemilikan sertifikat pelatihan yang diadakan di DPP, DPD tingkat I dan DPD tingkat II.
5. Keterlibatan pencalonan anggota legislatif yang berasal dari luar partai semata-mata untuk mendongkrak suara di daerah pemilihan yang dirasa masih jauh dari simpatisan Golkar dan menjadi kesepakatan dengan daerah pemilihan terutama pengurus kecamatan dan desa.

6. Sosialisasi calon anggota legislatif dalam daerah pemilihannya dilaksanakan pada pembentukan-pembentukan pengurus baru dalam tingkatan desa.
7. Selama calon anggota legislatif terpilih tim penjaringan terus memonitoring sampai pelaksanaan pemilu 2004 dilaksanakan.

A. Saran

Adapun saran dari hasil penelitian ini kepada partai politik terutama Golkar adalah sebagai berikut :

1. Kurang tertibnya syarat administrasi kepartaian dengan identitas keanggotaan maka perlu sekali pengurus daerah mewajibkan kartu tanda anggota (KTA) sebagai syarat partai agar bisa mengidentifikasi para anggotanya.
2. Tidak berputarnya uang iuran untuk pendanaan partai maka pengurus daerah harus mengambil inisiatif agar ada kewajiban pengurus kecamatan dan desa untuk mewajibkan iuran.
3. Masih tertutupnya penerimaan anggota partai sehingga akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik masih jauh.
4. Perlu adanya tim pemantauan calon kader yang ini bisa menjadikan partai lebih dinamis.
5. Perlu adanya rolling (pergantian) secara tepat sehingga jajaran pengurus sekarang tidak didominasi oleh orang-orang lama.
6. Perlu adanya pelatihan kader berjenjang sehingga kader bisa teruji secara wacana maupun secara praksis dengan memberikan kesempatan kepada kader yang lebih mudah.
7. Melepas hubungan struktural bagi kader yang telah menduduki jabatan pemerintahan dengan hal itu maka partai bisa lebih mandiri dari keputusan yang diambil.